

**PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, AKTIVITAS DAN PERTUMBUHAN
TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH (STUDI TERHADAP LAPORAN
KEUANGAN TAHUN 2011-2013 DI PROVINSI JAWA TIMUR)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Akuntansi



Oleh :

DEVI LUKITASARI SUKIJAYANTI

2011310706

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2016

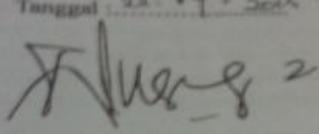
PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Devi Lukitasari Sukijayanti
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 17 Juni 1992
N.I.M : 2011310706
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata I
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Judul : Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Aktivitas dan
Pertumbuhan terhadap Kemandirian Daerah (Studi
terhadap Laporan Keuangan Tahun 2011-2013 Di
Provinsi Jawa Timur)

Disetujui dan diterima baik oleh:

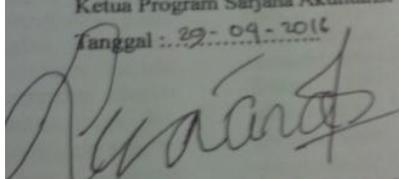
Dosen Pembimbing

Tanggal :

Dosen Pembimbing
Tanggal : 23 - 07 - 2014

(Dr. Drs. Diah Ekaningtias, Ak, MM)

Ketua Program Sarjana Akuntansi

Tanggal :

Ketua Program Sarjana Akuntansi
Tanggal : 29 - 09 - 2014

r. Luciana Spica Almilta, SE., M.Si., OIA)

**THE INFLUENCE LIQUIDITY, LEVERAGE, ACTIVITY AND GROTH OF
REGION'S AUTONOMY (THE STUDY OF LOCAL GOVERMENT
FINANSIAL STATEMENTS OF FISCAL YEAR 2011 OF 2013
IN THE PROVINCE OF EAST JAVA)**

Devi Lukitasari Sukijayanti

Student of Faculty Economic, STIE Perbanas Surabaya

2011310706@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

The research was conducted using secondary data of LKPD TA 2011 of 2013 in East Java Province which was proposed to understand the influence of liquidity leverage, activity and growth towards regional autonomy using multiple regression analysis with purposive sampling data partially and simultaneously. The population of this research are financial statements of local government in East Java (LKPD) for the budget year of 2011 of 2013 by Supreme Audit Board of Indonesia (BPK- RI) Representatives Office in East Java Province. The financial statements have been widely published through the official website djpk.depkeu.go.id. The end of the study population was 12 financial reports of local government in East Java. Using SPSS version 20 Based on the results of this study concluded that partial activity positive and significant impact on the independence of the region, while liquidity, leverage and growth not significant effect on the region's autonomy. Simultaneously variable liquidity, leverage, activity and growth significantly affects the region's autonom.

Key words: liquidity, leverage, activity, growth and regional autonomy.

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang terjadi pada awal tahun 1996 dan puncaknya pada tahun 1997 mendorong pemerintah pusat mendelegasikan sebagian wewenang untuk pengelolaan keuangan kepada daerah sehingga diharapkan daerah dapat membiayai pembangunan dan pelayanan atas dasar keuangan sendiri (Azhar, 2008). Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diambil

oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat mengelola pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat (Fitriani dan Pratolo, 2009).

Hadi, (2010) menyatakan bahwa pemberlakuan Undang-undang otonomi daerah yakni UU No. 32 Tahun 2004 dimaksudkan agar terciptanya kemandirian keuangan

daerah. Kemandirian keuangan daerah yang dimaksud adalah seberapa besar tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan atau mendanai segala aktivitasnya. Sehubungan dengan itu, Haryanto, (2007) menyatakan bahwa filosofi otonomi daerah adalah mewujudkan kemandirian daerah di segala segi

kehidupan yang diukur melalui elemen Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan data pada tabel 1 yang menunjukkan pencapaian PAD pada beberapa pemerintah daerah yang masih rendah dan proporsi DAU justru cenderung lebih tinggi dari proporsi PAD terhadap Total Pendapatan.

No	Kabupaten/Kota	Proporsi PAD	Proporsi DAU
1	Kab. Bangkalan	5,57%	58,49%
2	Kab. Banyuwangi	6,28%	63,33%
3	Kab. Blitar	6,38%	62,34%
4	Kab. Bojonegoro	8,82%	48,09%
5	Kab. Bondowoso	6,76%	62,94%
6	Kab. Gresik	11,34%	59,66%
7	Kab. Jember	11,28%	61,33%
8	Kab. Jombang	9,04%	66,90%
9	Kab. Kediri	7,53%	64,05%
10	Kab. Lamongan	8,76%	58,47%
11	Kab. Lumajang	8,07%	63,90%
12	Kab. Madiun	6,28%	63,33%
13	Kab. Magetan	6,81%	66,92%
14	Kab. Malang	8,55%	61,36%
15	Kab. Mojokerto	11,10%	63,39%
16	Kab. Nganjuk	9,04%	66,90%
17	Kab. Ngawi	6,76%	62,94%
18	Kab. Pacitan	6,18%	62,87%
19	Kab. Pamekasan	6,13%	60,42%
20	Kab. Pasuruan	11,91%	57,23%
21	Kab. Ponorogo	6,93%	62,49%
22	Kab. Probolinggo	6,18%	62,87%
23	Kab. Sampang	5,84%	66,40%
24	Kab. Sidoarjo	28,50%	45,16%
25	Kab. Situbondo	6,50%	64,29%
26	Kab. Sumenep	6,28%	63,33%
27	Kab. Trenggalek	6,76%	62,94%
28	Kab. Tuban	11,34%	59,66%
29	Kab. Tulungagung	8,93%	64,80%

No	Kabupaten/Kota	Proporsi PAD	Proporsi DAU
30	Kota Blitar	11,38%	59,52%
31	Kota Kediri	6,76%	62,94%
32	Kota Madiun	7,53%	64,05%
33	Kota Malang	16,96%	52,01%
34	Kota Mojokerto	10,61%	64,22%
35	Kota Pasuruan	6,76%	62,94%
36	Kota Probolinggo	6,81%	66,92%
37	Kota Surabaya	52,76%	20,77%
38	Kota Batu	8,22%	68,91%

Sumber : Data www.djpk.depkeu.go.id yang diolah.

Tingkat kemampuan keuangan daerah dapat ditinjau salah satunya dari besar kecilnya penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah dan retribusi. Realita yang terjadi di Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat dengan ditunjukkan hasil proporsi Dana Alokasi Umum lebih tinggi dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga akan berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Handra, 2009).

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, maka pemerintah daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli daerah (PAD),

dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah yang mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah (Fitriani dan Pratolo, 2009). Pada kenyataannya kebijakan otonomi daerah yang diterapkan pemerintah pusat belum dapat berjalan dengan baik karena masih banyak terjadi kesenjangan antar daerah di Indonesia (Adi, 2006). Kesenjangan ini muncul berkaitan dengan adanya sumbangan akan hasil eksploitasi sumber daya terhadap pembangunan ekonomi yang hanya berkuat di pusat (Thesaurianto, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh (Bhinadi, 2003) mengungkapkan bahwa adanya ketidakseimbangan pembangunan antara Jawa dengan pulau-pulau lain atau antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah harus pandai dalam menyelenggarakan pemerintahannya sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya evaluasi yang berkala atas capaian pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kemandirian

daerah wilayah Jawa Timur, dikarenakan pada tahun 2011-2013 adalah data yang terbaru dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang mengalami peningkatan pada Dana Alokasi Umum yang sangat tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah di Jawa Timur masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Likuiditas, *leverage*, Aktivitas dan Pertumbuhan yang diproksikan dengan tingkat Kemandirian Daerah di Wilayah Jawa Timur. Maka penelitian ini mengambil judul Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Aktivitas dan Pertumbuhan Terhadap Kemandirian Daerah (Studi Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2011- 2013 Di Provinsi Jawa Timur).

RERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Likuiditas

Likuiditas merupakan bagian dari analisis rasio laporan keuangan. Analisis Rasio merupakan teknik analisis yang dilakukan dengan membandingkan suatu perkiraan dengan perkiraan yang lain dalam laporan keuangan yang sama. Metoda analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan realisasi anggaran secara individu ataupun kombinasi dari kedua laporan tersebut (Hadi, 2010).

Bagi perusahaan swasta (lembaga yang bersifat komersial), umumnya rasio likuiditas dapat menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan segera (Halim,

2002:231). Dalam sektor publik khususnya pemerintah daerah, perhitungan rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membayar utang (kewajiban) jangka pendeknya. Sumarjo (2010) melalui penelitiannya pada sektor publik yang menyatakan bahwa semakin besar rasio likuiditas maka semakin menunjukkan sebuah entitas tidak mampu dalam membayar utang jangka pendeknya, karena membutuhkan dana dari pihak eksternal. Sedangkan semakin kecil rasio likuiditas, maka semakin besar kemampuan sebuah entitas dalam membiayai semua utang jangka pendeknya melalui dana internal, sehingga semakin besar rasio likuiditas, maka tingkat kemandirian suatu daerah semakin rendah.

Leverage

Leverage merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya. *Leverage* merupakan perbandingan antara hutang dan modal, semakin besar hutang yang dimiliki suatu entitas maka semakin rendah kemandirian keuangan entitas tersebut (Hadi, 2010).

Menurut Sumarjo (2010) melalui penelitiannya pada sektor publik yang menyatakan semakin besar rasio *leverage* maka semakin menunjukkan sebuah entitas tidak mampu dalam membiayai operasionalnya, karena membutuhkan dana dari pihak eksternal. Sedangkan semakin kecil rasio *leverage* maka semakin besar kemampuan sebuah entitas dalam membiayai biaya operasional melalui dana internalnya.

Pada sektor publik khususnya entitas pemerintah daerah, rasio

Leverage ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara ekuitas dana (kekayaan bersih pemerintah daerah) dengan total utang. Di pemerintah daerah, rasio *Leverage* ini mungkin belum merupakan rasio yang penting, dikarenakan utang daerah yang masih relatif kecil (STAN, 2007:108).

Aktivitas

Rasio Aktivitas secara umum aktivitas pemerintah daerah dapat dinilai dari alokasi (rasio) belanja yang muncul dalam anggaran, baik untuk belanja rutin, maupun untuk belanja pembangunan (Gideon dan Hariadi 2007:5). Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Pertumbuhan

Analisis pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan serta kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk

mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian (Halim, 2007:241).

Kemandirian Daerah

Kemandirian daerah merupakan bagian dari alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Yeremias (2008) menjelaskan bahwa kinerja keuangan merupakan suatu standar untuk menilai kemampuan lembaga pemerintah mendanai input dan dari sampai seberapa jauh lembaga pemerintahan mengikuti proses serta target yang telah ditentukan, tetapi sangat minim perhatian diberikan kepada pencapaian hasil akhir atau tujuan. Tradisi ini dapat diamati dari upaya-upaya lembaga pemerintahan selama ini khususnya dalam penyediaan dana dan sarana serta fasilitas program atau proyek, kepatuhan suatu lembaga terhadap berbagai aturan dan prosedur formal, dan perluasan jangkauan kelompok sasaran atau penerima program atau proyek. Lebih lanjut menurut Sumarsono (2009) bahwa kinerja keuangan merupakan suatu aktivitas bagaimana pemerintah melaksanakan aktivitas keuangan dalam suatu periode akuntansi dan bagaimana kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku.

Rasio Kemandirian digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan aktivitasnya. Rasio ini dapat diukur dengan membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah jumlah pinjaman (selain Utang PFK dan Utang Pajak PPN/PPh). DAU merupakan dana yang berasal dari APBN yang ditransfer ke pemerintah daerah dalam

rangka pelaksanaan otonomi daerah. DAU masih merupakan sumber pembiayaan yang utama (andalan) bagi pemerintah daerah pada umumnya. Dengan demikian dapat dikatakan bila perbandingan sumber pembiayaan dari PAD terhadap DAU semakin besar, berarti hal ini menunjukkan tingkat kemandirian yang semakin meningkat pula. Bila pinjaman jumlahnya dianggap material, maka untuk mengukur kemandirian unsur pinjaman tersebut harus diperhitungkan, akan tetapi sebaiknya mengeluarkan Utang PFK dan Utang Pajak Pusat sebab kedua jenis utang tersebut tidak dimaksudkan untuk menambah sumber pendanaan pemerintah daerah (STAN, 2007:108).

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya bahwa semakin rendah rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin tinggi. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD (Halim, 2002:233). Paul Hersey dan Kenneth Blanchard (Halim, 2002:168) mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan

daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu sebagai berikut:

- a. Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial);
- b. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah;
- c. Pola hubungan partisipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat;
- d. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat siap dan dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.
- e. Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat disajikan dalam matriks seperti tampak pada Tabel berikut ini :

Tabel 2
Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	> 25 – 50	Konsultatif
Sedang	> 50 – 75	Partisipatif
Tinggi	> 75 – 100	Delegatif

Sumber : Halim (2001)

Pengaruh Likuiditas Terhadap Kemandirian Daerah

Likuiditas merupakan bagian dari analisis rasio laporan keuangan. Dalam konteks ini, analisis rasio likuiditas menghasilkan indikator kemampuan pembayaran utang jangka pendek pemerintah daerah (Prasetya, 2005:47). Bagi perusahaan swasta (lembaga yang bersifat komersial), umumnya rasio likuiditas dapat menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan segera (Halim, 2002:231).

Menurut Sumarjo (2010) melalui penelitiannya pada sektor publik yang menyatakan bahwa semakin besar rasio likuiditas maka semakin menunjukkan sebuah entitas tidak mampu dalam membayar utang jangka pendeknya, karena membutuhkan dana dari pihak eksternal. Sedangkan semakin kecil rasio likuiditas, maka semakin besar kemampuan sebuah entitas dalam membiayai semua utang jangka pendeknya melalui dana internal. Berdasarkan uraian tersebut maka secara logika terdapat hubungan antara likuiditas dengan kemandirian daerah yaitu semakin besar rasio likuiditas, maka tingkat kemandirian suatu

daerah semakin rendah. Hal ini dapat dilihat pada penelitian Hadi (2010) bahwa rasio likuiditas secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Rasio likuiditas secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

Pengaruh Leverage Terhadap Kemandirian Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perhitungan rasio leverage pada suatu pemerintah daerah digunakan untuk mengukur perbandingan antara ekuitas dana (kekayaan bersih pemerintah daerah) dengan total utang. Rasio kemandirian sebagai indikator pengukuran kemandirian daerah dapat menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Sumber dana eksternal yang dimaksud selain DAU adalah unsur pinjaman yang harus turut diperhitungkan selain Utang PFK dan Utang Pajak Pusat sebab kedua jenis utang tersebut tidak dimaksudkan untuk menambah sumber pendanaan pada pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka secara logika

terdapat hubungan antara leverage dengan kemandirian daerah, jika dipandang dari sisi keberadaan utang atau pinjaman sebagai sumber pendanaan eksternal pemda. Semakin mampu menutup utang dengan ekuitas dana yang dimiliki berarti semakin kecil unsur utang sehingga semakin menaikkan tingkat kemandirian daerah dengan tidak terbebannya daerah dengan sumber dana eksternal berupa pinjaman atau utang.

Hipotesis 2 : Rasio *Leverage* secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

Pengaruh Aktivitas Terhadap Kemandirian Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan secara umum Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Berdasarkan uraian tersebut maka secara logika terdapat hubungan antara Aktivitas dengan kemandirian daerah adalah Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin/tidak langsung berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan)/langsung yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2002:235), sehingga semakin menaikkan tingkat kemandirian daerah dengan tidak terbebannya daerah dengan menaikkan belanja investasi

(belanja pembangunan) yang berasal dari sumber dana eksternal.

Hipotesis 3: Rasio Aktivitas berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

Pengaruh Pertumbuhan Terhadap Kemandirian Daerah

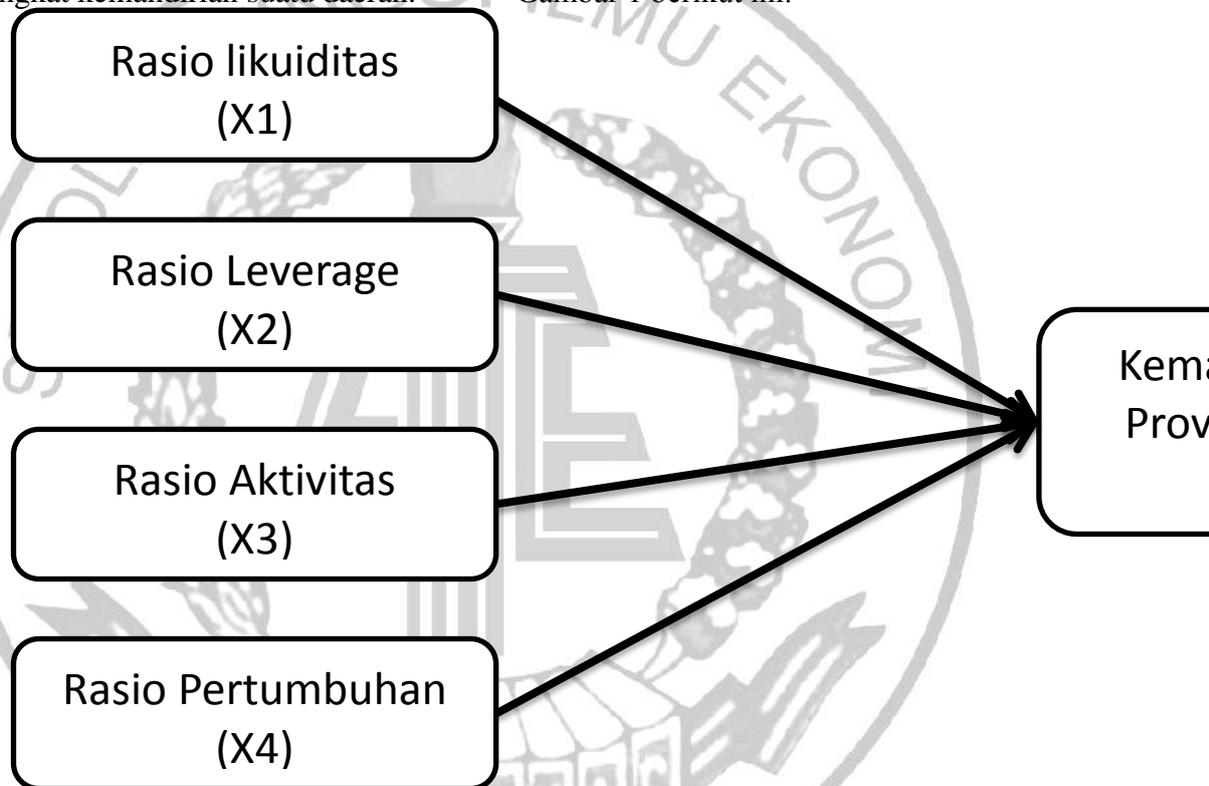
Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya, dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran yang dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi utama yang perlu mendapat perhatian. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan Gross Domestic Product (GDP) atau Gross National Product (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk (Agustina,2013).

Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan untuk menjaga kesinambungan keuangan daerah, pada prinsipnya pertumbuhan belanja harus terencana dan terkendali dengan baik agar kesinambungan dan stabilitas fiskal terjaga mengingat setiap anggaran berkaitan dengan target kinerja. Apabila semakin tinggi nilai PAD dan Belanja Pembangunan yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Rutin, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya.Selanjutnya jika

semakin nilai tinggi PAD, TPD, dan Belanja Rutin yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Pembangunan, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan belum mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode yang berikutnya. Semakin tinggi persentase pertumbuhan ekonomi, sehingga semakin tinggi pula tingkat kemandirian suatu daerah.

Hipotesis 4 : Secara parsial Rasio Pertumbuhan berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

Berdasarkan kerangka teoritis yang dikembangkan menjadi suatu kerangka pemikiran dalam penelitian tentang pengaruh likuiditas, *leverage*, aktivitas dan pertumbuhan terhadap kemandirian daerah ini, maka dapat digambarkan dalam diagram skematis kerangka pemikiran sebagaimana Gambar 1 berikut ini.



METODE PENELITIAN

Klasifikasi Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur yang berada di Laporan Keuangan tahun 2011-2013 dengan jumlah 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama tiga tahun. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja

sesuai dengan persyaratan sampel yang di butuhkan. Kriteria dalam pengambilan sampel yaitu:

1. Kabupaten/Kota menerbitkan Laporan Keuangan secara berturut-turut (lengkap) terdiri dari neraca dan laporan realisasi anggaran pada tahun 2011-2013.
2. Semua data yang dibutuhkan dalam menentukan komponen perhitungan rasio disajikan

secara lengkap.

Data Penelitian

Sumber data, penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2011-2013 di Provinsi Jawa Timur yang telah diaudit oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan hasil auditnya telah dipublikasikan di situs resmi BPK-RI yakni pada website www.bpk.go.id yang bisa diakses secara umum oleh semua pihak.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen yaitu kemandirian daerah dan variabel independen yaitu rasio likuiditas, *leverage*, aktivitas dan pertumbuhan.

Definisi Operasional Variabel

Likuiditas

Perhitungan rasio likuiditas pada suatu pemerintah daerah digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membayar utang (kewajiban) jangka pendeknya. Salah satu indikator pengukuran likuiditas adalah menggunakan rasio lancar yang menunjukkan perbandingan antara aktiva lancar (di luar persediaan) dengan utang jangka pendek.

Sehingga data yang dibutuhkan diperoleh dari Laporan Keuangan di bagian Neraca Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang Jangka Pendek}}$$

Leverage

Perhitungan rasio *leverage* pada suatu pemerintah daerah digunakan untuk mengukur perbandingan antara ekuitas dana (kekayaan bersih pemerintah daerah) dengan total utang. Hubungan antara *leverage* dengan kemandirian daerah, jika dipandang dari sisi keberadaan utang atau pinjaman sebagai sumber pendanaan eksternal pemda. sehingga data yang dibutuhkan diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Leverage} = \frac{\text{Total Ekuitas Dana}}{\text{Total Utang}}$$

Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Sehingga data yang dibutuhkan diperoleh dari Laporan Keuangan di bagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Aktivitas} = \frac{\text{Total belanja rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian, Sehingga data yang dibutuhkan diperoleh dari Laporan Keuangan di bagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} =$$

$$\frac{\frac{PAD_{tahun\ p}-PAD_{tahun\ p-1}}{PAD_{tahun\ p-1}} \times 100\%}{\frac{Total\ Belanja_{tahun\ p}-Total\ Belanja_{tahun\ p-1}}{Total\ Belanja_{tahun\ p-1}}}$$

Rasio Pertumbuhan Belanja =

Keterangan : p = tahun yang dihitung , p-1 = tahun sebelumnya)

Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan aktivitasnya. Rasio ini dapat diukur dengan membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah jumlah pinjaman (selain Utang PFK dan Utang Pajak PPN/PPH). DAU merupakan dana yang berasal dari APBN yang ditransfer ke pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. DAU masih merupakan sumber pembiayaan yang utama (andalan) bagi pemerintah daerah pada umumnya, Sehingga data yang dibutuhkan diperoleh dari Laporan Keuangan di bagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{Kemandirian\ daerah = \frac{Realisasi\ Pendapatan\ Asli\ Daerah}{\{DAU + (Utang - Utang PFK - Utang Pajak Pusat)\}}}$$

Alat Analisis

Untuk menguji hubungan antara likuiditas, *leverage*, aktivitas dan pertumbuhan terhadap kemandirian daerah Provinsi Jawa Timur periode 2011-2013 digunakan model regresi linear berganda. Adapun model dari analisis tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana :

- Y =Kemandirian Daerah
- a =Konstanta
- b₁...b₄ =Parameter koefisien regresi variable I (i = 1,2,3,4)
- X₁ =Rasio Likuiditas
- X₂ =Rasio *leverage*
- X₃ =Rasio aktivitas
- X₄ =Rasio pertumbuhan
- e =Faktor – faktor lain

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Deskriptif

Analisi deskriptif merupakan analisis yang terkait dengan penjelasan atau gambaran mengenai suatu data dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk mengetahui dan menggambarkan secara menyeluruh mengenai variabel-variabel yang digunakan. Tabel 3 berikut adalah hasil uji deskriptif.

Tabel 3

Descriptive Statistics

	N Statistic	Minimum Statistic	Maximum Statistic	Mean Statistic	Std. Deviation Statistic
Likuiditas	114	1,5715	93202,6	1178,745	9157,244
<i>Leverage</i>	114	36,008	742327,3	11961,28	77032,41
Aktivitas	114	0,1355	0,8345	0,432089	0,138926
Pertumbuhan PAD	114	-0,117	1,8009	0,352566	0,335964
Pertumbuhan belanj_rutin	114	-0,022	0,529	0,171486	0,098057
Kemandirian Daerah	114	0,0032	0,2953	0,135182	0,057087
Valid N (listwise)	114				

Sumber : Data diolah

Berdasarkan pada tabel 3 diperoleh hasil likuiditas minimum dengan nilai 1,5715 yang dimiliki Kota Bangkalan tahun 2013. Sedangkan nilai maksimumnya sebesar 93202,6 yaitu diperoleh kota Sidoarjo pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa nilai dari rasio likuiditas Provinsi Jawa Timur selama tiga tahun masih belum menunjukkan kestabilannya untuk memandirikan daerah nya, karena pada tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa kestabilan dalam hal untuk membayar hutang pemerintah masih tinggi dan juga dapat di lihat bahwa nilai rata-rata rasio likuiditas menunjukkan nilai yang lebih kecil dengan nilai standar deviasi.

Nilai minimum rasio *leverage* yaitu 36,008 yang dimiliki oleh Kabupaten Pamekasan tahun 2012. Sedangkan nilai maksimum nya yaitu 742327,3 yang dimiliki oleh Kabupaten Sampang pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2012 Kabupaten Sampang memiliki kemampuan membayar utang (Kewajiban) keseluruhan yang paling tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* berarti semakin menunjukkan sebuah entitas tidak mampu dalam membiayai operasionalnya melalui dana internalnya. Nilai rata-rata yang dihasilkan dari rasio *leverage* menunjukkan penurunan setiap tahunnya, dengan nilai standar deviasi yang bernilai lebih tinggi, hal ini menunjukkan bahwa jika nilai standar deviasi lebih tinggi dari nilai mean maka sebaran data dapat dikatakan tidak baik. Dengan rata-rata

leverage mengalami penurunan setiap tahunnya.

Nilai minimum yang dihasilkan rasio aktivitas sebesar 0,1355% yang dimiliki Kota Surabaya tahun 2013. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2013 Kota Surabaya masih memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin relatif kecil. Sedangkan nilai maksimumnya adalah 0,8345 yang dimiliki oleh Kabupaten Tulungagung pada tahun 2013. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa jika nilai yang dihasilkan dari kabupaten/kota itu lebih tinggi, maka kabupaten/kota tersebut masih belum menunjukkan kemandiriannya terhadap daerah, karena rasio aktivitas menggambarkan seberapa besar dana yang dialokasikan terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan yang dikeluarkan.

Nilai minimum rasio pertumbuhan PAD sebesar -0,117% ang dimiliki Kota Pasuruan tahun 2011. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2011 Kota Pasuruan masih relatif rendah pada pertumbuhan PAD, sedangkan nilai maksimum pertumbuhan PAD sebesar 1.8009% dimiliki oleh Kabupaten Blitar pada tahun 2013. Kemudian pada hasil pertumbuhan belanja sebesar -.0022% yang dimiliki Kota Surabaya tahun 2013, sedangkan nilai maksimum dari rasio pertumbuhan belanja yaitu sebesar 0.5290% dimiliki oleh Kabupaten Bangkalan pada tahun 2011. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Selanjutnya jika semakin nilai tinggi PAD, dan Belanja Rutin yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Pembangunan, maka

pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan belum mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode yang berikutnya.

kemandirian daerah terendah yaitu 0.0032% yang dimiliki

Kabupaten Sidoarjo tahun 2012, sedangkan nilai tertinggi yaitu sebesar 0.2953% dimiliki oleh Kota Malang pada tahun 2011, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2011 Kota Malang mempunyai sumber pembiayaan dari PAD terhadap DAU semakin besar.

Hasil analisis dan Pembahasan

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Std. Error	t Hitung	Sig
Konstanta	0,166	0,018	9.378	.000
Likuiditas	-1,618	0	-3.153	.002
Leverage	-7,75	0	-1.264	.209
Aktivitas	0,105	0,034	-3.081	.003
Pertumbuhan PAD	0,068	0,014	4.904	.000
Pertumbuhan Belanja Rutin	-0,04	0,048	-.822	.413
R Square	0,53			
Adjusted R Square	0,247			
F Hitung	8,416			
Sig. F	.000 ^a			

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, koefisien regresi untuk likuiditas adalah negatif 1,618, *leverage* negatif -7,75 dan pertumbuhan belanja rutin sebesar negatif -0,04. Hal ini menunjukkan bahwa jika likuiditas, *leverage*, dan pertumbuhan belanja naik satu satuan, maka mengakibatkan turunnya kemandirian daerah sebesar 1,618, 7,75, dan 0,04 satuan dengan asumsi

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahuikan teori yang ada nilai yang berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah adalah rasio likuiditas, aktivitas dan pertumbuhan. Hal tersebut nilai signifikansi variabel

variabel lain dianggap konstan. Hal ini sama dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa likuiditas yang tinggi maka akan menurunkan kemandirian daerah, karena untuk menutupi semua hutang yang ada dalam jumlah besar, maka pihak internal akan meminta bantuan kepada pihak eksternal. Sehingga daerah tersebut belum dikatakan mandiri.

tersebut $<0,05$. Sedangkan variabel yang lain tidak berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah. Beberapa penjelasan tentang pengaruh likuiditas, *leverage*, aktivitas dan pertumbuhan sebagai berikut:

1. Pengaruh likuiditas terhadap kemandirian daerah

Likuiditas merupakan bagian dari analisis rasio laporan keuangan. Analisis Rasio merupakan teknik analisis yang dilakukan dengan membandingkan suatu perkiraan dengan perkiraan yang lain dalam laporan keuangan yang sama. Metoda analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan realisasi anggaran secara individu ataupun kombinasi dari kedua laporan tersebut. Kabupaten/kota

Rata-rata likuiditas disini dapat diketahui bahwa dari 38 Kabupaten / Kota yang menunjukkan angka yang sangat drastis yaitu Kabupaten Sidoarjo sebesar 310,95, Kota Mojokerto yaitu sebesar 102,01 dan Kota Pasuruan sebesar 11,14 disini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo, Kota Mojokerto dan Kota Pasuruan mempunyai hutang yang tinggi, sehingga pemerintah daerah mampu untuk membayar hutang dengan Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh rasio likuiditas terhadap kemandirian daerah berpengaruh positif dikarenakan dana yang dibutuhkan untuk membayar hutang adalah dari pendapatan asli daerah masing-masing daerah, pembiayaan atas hutang jangka pendek pemerintah, terutama Kabupaten Sidoarjo, Kota Mojokerto dan Kota Pasuruan memberikan kontribusi yang baik, dengan adanya tempat wisata yang ada di Kota Sidoarjo dan Kota Mojokerto membuat pemerintah daerah bisa mendapatkan dana dari Pendapatan asli mereka

2. Pengaruh Leverage Terhadap

Kemandirian Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang terkait dengan pengaruh *leverage* terhadap kemandirian daerah diperoleh dalam uji secara parsial (uji t) dapat diketahui bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur memiliki dana internal yang belum kuat untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya sehingga pemerintah daerah masih bergantung pada pinjaman atau hutang dari pihak eksternal.

Tidak signifikannya rasio *leverage*, terhadap kemandirian daerah dikarenakan karena dana yang dibutuhkan untuk membayar hutang jangka panjang adalah bantuan dari pemerintah pusat, disini dapat diketahui pada tabel 1.1 bahwa proporsi Dana Alokasi terhadap pendapatan yaitu menunjukkan nilai yang tinggi, sehingga dapat diketahui bahwa dana yang dialokasikan untuk membayar hutang jangka pendek berasal dari pemerintah pusat.

3. Pengaruh Aktivitas terhadap Kemandirian Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang terkait dengan pengaruh aktivitas terhadap kemandirian daerah diperoleh dalam uji secara parsial (uji t) dapat diketahui bahwa aktivitas berpengaruh terhadap kemandirian daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur. Hasil tersebut didukung dengan analisis deskriptif dimana dari analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata rasio aktivitas menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah sangat tinggi dalam mengalokasikan dana pada

belanja rutin dan belanja pembangunan yang dikeluarkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Oesi Agustina (2013) yang menyatakan bahwa rasio Aktivitas berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

4. Pengaruh Pertumbuhan terhadap Kemandirian Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang terkait dengan pengaruh pertumbuhan terhadap kemandirian daerah diperoleh dalam uji secara parsial (uji t) dapat diketahui bahwa pertumbuhan berpengaruh terhadap kemandirian

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1) pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel likuiditas, *leverage*, aktivitas dan pertumbuhan secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Adapun besarnya pengaruh variabel tersebut secara simultan terhadap kemandirian daerah sebesar 24,7 persen.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel likuiditas, aktivitas dan pertumbuhan berpengaruh positif. Sedangkan *leverage* secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu (1) Jumlah rasio yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan empat rasio keuangan yang ada, sehingga hal ini

daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 sampai dengan 2013 mengalami peningkatan, hal ini yang dapat menjadi presentasi untuk bisa melihat bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah masih tinggi pada tahun 2013. Dan pada grafik pertumbuhan belanja rutin maka dapat diketahui setiap tahun mengalami penurunan. Maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

mungkin akan mempengaruhi hasil analisis penelitian ini. (2) Penelitian ini hanya dilakukan di lingkup Provinsi Jawa Timur. (3) Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanya 3 tahun.

Berdasarkan pada hasil dan keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, kota maupun kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur agar senantiasa berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya pada tahun-tahun berikutnya karena pada TA 2011 tingkat kemandirian daerah masih rendah.

Bagi Penelitian selanjutnya bisa meneliti atau mencari dan menambah variabel-variabel lain yang dapat menjelaskan atau mempengaruhi kemandirian daerah tersebut, misalnya PAD, DAU dan utang pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

DAFTAR RUJUKAN

Adi, P. H. (2006). Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi,

Belanja Pembangunan Dan Pendapatan Asli Daerah. *Proceding Simposium Nasional Akuntansi Xi Padang* .

- Agustina, O. A. (2013). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* .
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian- Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azhar, K. S. (2008). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum Dan Setelah Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi* .
- Bastian, I. (2003). *Sistem Akuntansi Sektor Publik Modul Untuk Pelatihan Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bhinadi, A. (2003). Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa Dan Luar Jawa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* , Volume 8 No 1. Hal 39-48.
- Espinoza. (2014). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Ekonomi* .
- Fidelius. (2013). Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado. *Jurnal Emba Vol.1 No.4 Issn 2303-1174* , Hal. 2088-2096.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivarite Dengan Spss*. Semarang: Cetakan Ke Empat Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, W. (2010). Pengaruh Likuiditas Dan Leverage Terhadap Kemandirian Daerah (Studi Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2007 Di Wilayah Provinsi Aceh). *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* , Vol. 3. No. 1. Januari Hal. 29-51.
- Halachmi, A. (2005). Performance Measurement Is Only One Way Of Managing Performance . *International Journal Of Productivity And Performance Management* , Vol. 54. Hal 502-516.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Edisi Pertama Salemba Empat.
- Handra, H. D. (2009). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bukan Pajak Pemerintah Propinsi Sumatra Barat . *Penelitian Keuangan Sektor Publik Nii Badan Litbang Departemen Dalam Negeri* .
- Haryanto, J. T. (2007). Kemandirian Daerah Sebuah Perspektif Dengan Metode Path Analysis. *Artikel Ilmiah* .
- Mahmudi. (2011). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.: Erlangga.
- Mctavish, H. L. (1993). *Descriptive And Inferential Statistics: An Introduction. 4th Edition*. Singapore: Allyn And Bacon.
- Podrug. (2011). The Strategisrrole Of Managerial Stewardship Behaviour For Acheiving Corporate Citizenship. *Ekonomski Pregled* , Vol. 62 (7-8).
- Prasetya, I. (2006). *Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Depok: Fisip Ui.
- Pratolo, I. R. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Pembangunan Terhadap Rasio Kemandirian

- Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Penelitian Keuangan Akuntansi Sektor Publik Ii Badan Litbang Departemen Dalam Negeri.*
- Priyo, T. G. (2007). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum Dan Sesudah Otonomi (Studi Empiris Di Propinsi Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Keuangan .*
- Publik., T. P. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Daerah. .* Tangerang: Tinggi Akuntansi Negara/Stan.
- Rinaldi, U. (2012). Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi ,* Vol: 8 No.2.
- Riyanto, B. (2008). *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan.* Yogyakarta: Penerbit Gpfe.
- Sekaran, U. (2006). *Research Methods For Business Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Buku 2 Edisi 4.* Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sesotyaningtyas, M. (2012). Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal Issn 2252-6765 ,* Aaj 1 (1) .
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B.* Bandung: Alfabeta.
- Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan .*
- Sumarsono, H. (2009). Analisis Kemandirian Otonomi Daerah: Kasus Kota Malang (1999-2004). *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol:1 No.1 2009. ,* Vol:1 No.1 2009.
- Suprpto, T. (2006). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Masa Otonomi Daerah Tahun 2000-2004. *Jurnal Ekonomi Pemanagunan .*